Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Lampiran III

INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pasal 343 Permendagri No 86 tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam

penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang sebelumnya di susun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2015 namun untuk tahun 2021 akan berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Penggantinya yaitu Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Penerapan aplikasi SIPD selain memudahkan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pemerintah Provinsi dan Pusat juga memberikan kemudahan dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan yang akan berdampak pada perubahan nomenklatur program dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-

Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;

16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Inspektorat disusun dengan maksud untuk mengarahkan pelayanan Inspektorat khususnya dalam jangka waktu 1 tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah untuk :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen Renja Inspektorat Daerah sebagai pedoman pencapaian program Renstra selama satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 **Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah**
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Formulir E.81 (terlampir)
Formulir E.70 (terlampir)

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan nomenklatur program dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah Daerah mulai tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Penggantinya yaitu Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Sesuai permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2021 juga dilakukan peralihan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan Pemerintah Kota Salatiga yang sebelumnya menggunakan Simda BPKP ke SIPD dari Kemendagri.

Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 – 2029 berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Inspektorat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi menjalankan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASn

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4.2 Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai

1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Mebel

1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.3 Pemeliharaan Mebel

1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3 Reviu Laporan Kinerja

2.1.4 Reviu Laporan Keuangan

2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal

2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah

2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan

3.1.1 Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan

3.2 Pendampingan dan Asistensi

3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

3.2.2 Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.2.4 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga
Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga :
Meningkatnya Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Kine
rja

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target Akhir RPD Kota Salatiga (Tahun 2026)		Kondisi Awal (2022)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Perangkat Daerah Pengampu
		Kode	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan		K	Rp		K	Rp	K	Rp	I K	I Rp	II K	II Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)
	Meningkatnya Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Kinerja	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH																					
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH																					
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			75.000.000			26.523.750		229.096.900		600.000		2.725.000		2.725.000				29.248.750		36,99833333	
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	82		79	90,86		81		90		90		90		111		202		246		
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	90		86	94,41		89		94		94		94		106		200		222		
			Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	75		NA	87		60		60		60		60		100		187		249		
		6.01.02. 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			52.000.000			25.839.750		205.500.900		600.000		2.485.000		2.485.000		1,209		28.324.750		54,47	
			Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100		100	100		100		10		50		50	-	50		150		150		
		6.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			6.500.000			8.176.000		7.667.800		-			-	-			-				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48		48	48		48		4		24		24	-	50		98		204		
		6.01.02.2.01.0002	Sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			12.000.000			3.466.000		12.739.000		-			-	-			-				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	26		26	26		26		2		14		14	-	54		80		307		

		6.01.02.2.01.0003	Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja			5.500.000			2.960.000		9.222.900		-			-	-			-				
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4		4	4		4		0		2		2	-	50		54		1.350		
		6.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan			18.000.000			4.436.000		14.611.000		-		1.285.000	-	1.285.000			-				
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12		12	12		12		0		6		6	-	50		62		517		
		6.01.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal			4.000.000			2.151.750		146.457.400		600.000		1.200.000	-	1.200.000			-				
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1		1	1		1		0		0		-	-	-		1		100		
		6.01.02.2.01.0007	Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			6.000.000			4.650.000		14.802.800		-			-	-			-				
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4		4	4		4		1		2		2	-	50		54		1.350		
		6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			23.000.000			684.000		23.596.000		-		240.000	-	240.000			-				
			Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100		100	100		100		10		50		50	-	50		150		150		
		6.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			6.000.000			540.000		5.000.000					-	-			-				
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1		1	1		1		0		0		-	-			1		100		
		6.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			17.000.000			144.000		18.596.000				240.000	-	240.000			-				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10		10	10		10		0		0		-	-	-		10		100		
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			330.000.000			673.233.800		876.549.000		2.710.000		26.790.000	-	26.790.000		3,056	-	700.023.800		2121284242		
			Nilai MCP Korsupgah KPK	%	86		86	94,58		84,00		10		10		10	-	12		106		124		
		6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			3.500.000			768.000		2.500.000		-		-	-	-			-				
			Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	100		100	100		100		10		10		10	-	10		110		110		
		6.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			3.500.000			768.000		2.500.000					-	-			-				
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5		5	5		5		1		1		1	-	20		25		500		
		6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			326.500.000			672.465.800		874.049.000		2.710.000		26.790.000	-	26.790.000			-				
			Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	100		100	100		100		10		10		10	-	10		110		110		
		6.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			90.900.000			381.286.200		142.233.000				12.550.000	-	12.550.000			-				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32		32	32		32		32		32		32	-	100		132		413		
		6.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,			27.500.000			4.790.000		30.170.000					-	-			-				

			Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																						
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	32		32	32		32		32		32		32	-	100		132		413		
		6.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			197.500.000			245.954.600		648.483.000		2.350.000		5.890.000	-	5.890.000			-				
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	7		7	7		7		1		1		1	-	14		21		304		
		6.01.03.2.02.0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			10.600.000			40.435.000		53.163.000		360.000		8.350.000	-	8.350.000			-				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	32		32	32		32		32		32		32	-	100		132		413		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.211.400.000**			7.675.297.223		8.395.398.248		2.157.201.167		4.122.618.541	-	2.157.201.167		25,695	-	9.832.498.390		136.346.5955	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84		80	81,58		82		10		10		10	-	12		94		112		
		6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000			2.324.000		2.500.000		-		-	-	-			-				
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125		
		6.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			500.000			2.324.000		2.500.000		-		-	-	-			-				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	14		14	14		14		4		4		4	-	29		43		304		
		6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.436.400.000			5.958.302.860		6.512.537.380		2.023.999.280		3.474.923.898	-	2.023.999.280			-				
			Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125		
		6.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.418.400.000			5.941.022.860		6.495.037.380		2.023.999.280		3.474.923.898	-	2.023.999.280			-				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	46		46	46		46		36		36		36	-	78		124		270		
		6.01.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			10.000.000			17.280.000		17.500.000		-			-	-			-				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1		1	1		1		1		1		1	-	100		101		10.100		
		6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			10.000.000			17.239.450		22.500.000		-		-	-	-			-				
			Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125		
		6.01.01.2.03.0002	Sub. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000			17.239.450		22.500.000		-			-	-			-				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	mobil	1		1	1		1		-		-		-	-	-		1		100		
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			136.000.000			342.191.000		382.000.000		28.149.000		179.339.000	-	28.149.000			-				
			Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125		

		6.01.01.2.05.0005	Sub. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			1.000.000			-		5.000.000					-	-			-				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1		1	1		1		1		1		1	-	100		101		10.100		
		6.01.01.2.05.0009	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			135.000.000			342.191.000		377.000.000		28.149.000		179.339.000	-	28.149.000			-				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	42		42	42		42		36		36		36	-	86		128		304		
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			209.500.000			498.527.666		588.694.952		51.503.806		138.998.556	-	51.503.806			-				
			Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125		
		6.01.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor			4.500.000			8.825.500		8.000.000				7.219.500	-	-			-				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		6	6		6		1		1		1	-	17		23		378		
		6.01.01.2.06.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000			13.597.500		14.006.400				13.684.000	-	-			-				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12		12	12		12		8		8		8	-	67		79		656		
		6.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000			52.123.600		55.000.000		1.446.500		44.352.750	-	1.446.500			-				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	26		26	26		26		20		20		20	-	77		103		396		
		6.01.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.000.000			23.574.900		25.000.000		270.500		10.955.000	-	270.500			-				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24		24	24		24		18		18		18	-	75		99		413		
		6.01.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.000.000			2.580.000		3.102.000		765.000		1.010.000	-	765.000			-				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12		12	12		12		3		3		3	-	25		37		308		
		6.01.01.2.06.0008	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.000.000			12.740.000		15.000.000		360.000		1.590.000	-	360.000			-				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1		1	1		1		1		1		1	-	100		101		10.100		
		6.01.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			120.000.000			385.086.166		468.586.552		48.661.806		60.187.306	-	48.661.806			-				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120		120	120		120		20		20		20	-	17		137		114		
		6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-			276.419.500		74.383.700		-		-	-	-			-				
			Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125		
			Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													-	-			-				
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													-	-			-				
			Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel			-										-	-			-				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit												-	-			-				

		6.01.01.2.07.0006	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			276.419.500		74.383.700		-		-	-	-			-					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit												-	-			-					
		6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			192.000.000			225.663.850		258.207.016		35.234.081		87.648.587	-	35.234.081			-					
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125			
		6.01.01.2.08.0001	Sub. Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000			1.092.000		2.500.000		1.561.000		1.561.000	-	1.561.000			-					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12		12	12		12						-	-	-		12		100			
		6.01.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			38.000.000			28.476.588		45.707.016		10.778.854		11.379.595	-	10.778.854			-					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12		12	12		12						-	-	-		12		100			
		6.01.01.2.08.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.000.000			12.000.000		18.000.000		1.000.000		1.000.000	-	1.000.000			-					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12		12	12		12						-	-	-		12		100			
		6.01.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			140.000.000			184.095.262		192.000.000		21.894.227		73.707.992	-	21.894.227			-					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12		12	12		12		3		3		3	-	25		37		308			
		6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			227.000.000			354.628.897		554.575.200		18.315.000		241.708.500	-	18.315.000			-					
			Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100		100	100		100		25		25		25	-	25		125		125			
		6.01.01.2.09.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			27.000.000			22.838.000		38.000.000		3.175.000		5.715.000	-	3.175.000			-					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		1	1		1		1		1		1	-	100		101		10.100			
		6.01.01.2.09.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			145.000.000			177.778.797		203.754.900		14.140.000		38.634.500	-	14.140.000			-					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18		18	18		18		3		3		3	-	17		35		193			
		6.01.01.2.09.0005	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel			-			9.000.000		6.000.000				-	-	-			-					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		1	1		1		1		1		1	-	100		101		10.100			
		6.01.01.2.09.0006	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.000.000			44.155.000		40.000.000		1.000.000		1.000.000	-	1.000.000			-					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	39		39	39		39		8		8		8	-	21		60		153			
		6.01.01.2.09.0009	Sub. Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.597.100		264.816.300				196.359.000	-	-			-					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1		1	1		1		1		1		1	-	100		101		10.100			
		6.01.01.2.09.0011	Sub. Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						260.000		2.004.000				-	-	-								

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0		0									-	-							
		Rata-Rata/Jumlah		83,40	2.538.800.000	82,75	89,69	2.791.684.924	79,20	3.167.014.716	52,80	720.170.389	52,80	1.384.044.514	52,80	728.905.389	68,17	23,016	157,85	3.520.590.313	1410,36	138,6714319	
															77,46	23,01553527	129,1	29,060	189,27	138,67	1691,08	262,64	
								8.375.054.773		9.501.044.148					TINGGI	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	

Pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah telah sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan rencana kerja.

Dari tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota dapat diketahui realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi dengan capaian 77,46 dengan kategori capaian kinerja tinggi namun realisasi capaian keuangan 23,015 masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga, terdapat faktor yang mendorong keberhasilan program serta faktor yang menghambat keberhasilan program sebagai berikut :

2.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Sesuai hasil pemetaan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Berikut Faktor Pendorong dan Penghambat keberhasilan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola program kegiatan.

- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat meningkatkan kelancaran program kegiatan administrasi perkantoran.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.
- Adanya dokumen kebutuhan Diklat / Bimtek / Kapabilitas dan PKS serta perhitungan kebutuhan anggarannya.
- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Inspektorat Kota Salatiga dapat berjalan dengan optimal.
- Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah.

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Faktor penghambat pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kegiatan.
- Kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam pengelolaan program kegiatan yang menyebabkan target kinerja dilaksanakan secara kurang optimal.
- KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tidak melihat KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- Adanya refocusing anggaran yang dilaksanakan di Kota Salatiga menindaklanjuti adanya kekurangan pagu anggaran belanja sehingga adanya kegiatan yang sudah direncanakan untuk di laksanakan yaitu Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah yang semula di anggarkan 1.170.758.900,- menjadi 388.685.500,- tidak terlaksana sejumlah 782.073.400,- karena menjadi anggaran yang di refocusing.

- Adanya perubahan peraturan dan kebijakan serta pergantian penggunaan aplikasi penatausahaan Keuangan Daerah ke SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) yang belum berjalan secara optimal mengakibatkan perlunya aplikasi pendukung SIPKD (Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah). Penggunaan 2 aplikasi, SIPD pada tahap perencanaan dan SIPKD dalam tahap keuangan memerlukan sinkronisasi data secara berkala dalam pemakaian 2 aplikasi tersebut.

c. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya

- Mengoptimalkan anggaran yang sudah direncanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya
- Melaksanakan komunikasi internal antara para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pembantu Bendahara Kegiatan.
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan

2.2.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sesuai hasil pemetaan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Program ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Berikut Faktor Pendorong dan Penghambat keberhasilan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota :

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah sebagai berikut:

- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.

- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Program Penyelenggaraan pengawasan adalah ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) baik APIP maupun unsur-unsur penunjang dalam mengelola program kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.
- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung program penyelenggaraan pengawasan di Inspektorat Kota Salatiga.
- Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah.
- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat meningkatkan kelancaran Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- Adanya kerjasama yang baik dengan instansi vertikal yang terkait yaitu Badan pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri dan Kepolisian RI.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan :

- Adanya perubahan Peraturan dan Kebijakan Program Penyelenggaraan Pengawasan mengakibatkan perubahan dalam sistem pelaporan pencapaian kinerja Penyelenggaraan Pengawasan.
- Adanya pemeriksaan yang tidak tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disusun sehingga menyebabkan adanya

perubahan dari rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya.

- Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan.
- KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tidak melihat KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- Adanya perubahan peraturan dan kebijakan serta pergantian penggunaan aplikasi penatausahaan Keuangan Daerah ke SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) yang belum berjalan secara optimal mengakibatkan perlunya aplikasi pendukung SIPKD (Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah. Penggunaan 2 aplikasi, SIPD pada tahap perencanaan dan SIPKD dalam tahap keuangan memerlukan sinkronisasi data secara berkala dalam pemakaian 2 aplikasi tersebut.
- Kurangnya koordinasi dan Instansi vertikal terkait sehingga hasil penyelenggaraan pengawasan kurang optimal.
- Kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam pengelolaan program kegiatan yang menyebabkan target kinerja dilaksanakan secara kurang optimal.

c. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya

- Mengoptimalkan anggaran yang sudah direncanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya
- Melaksanakan komunikasi internal antara para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pembantu Bendahara Kegiatan.
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan

2.2.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sesuai hasil pemetaan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Program ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan 5 (lima).

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
- Adanya kerjasama yang baik dengan Instansi vertikal yang terlibat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik.
- Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah.
- Kecukupan ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya pengawasan yang optimal.
- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat meningkatkan kelancaran program kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.

b. **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :**

- Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga kualitas hasil pemeriksaan kurang optimal.
- Kurangnya pemahaman tentang Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dari para aparatur pengawasan.
- KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tidak melihat KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- Adanya perubahan peraturan dan kebijakan serta pergantian penggunaan aplikasi penatausahaan Keuangan Daerah ke SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) yang belum berjalan secara optimal mengakibatkan perlunya aplikasi pendukung SIPKD (Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah. Penggunaan 2 aplikasi, SIPD pada tahap perencanaan dan SIPKD dalam tahap keuangan memerlukan sinkronisasi data secara berkala dalam pemakaian 2 aplikasi tersebut.

c. **Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya**

- Mengoptimalkan anggaran yang sudah direncanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya
- Melaksanakan komunikasi internal antara para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pembantu Bendahara Kegiatan.
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan

Tindak lanjut dan upaya dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah pada RKPD tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
   dan Prosedur Pengawasan.
2. Mengupayakan peningkatan komitmen dari pimpinan daerah serta para pengambil kebijakan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.
3. Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dengan melihat kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
4. Memastikan kecukupan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur pemeriksa maupun pelaksana sesuai dengan kebutuhan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ada, serta mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Instansi yang berwenang.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat, bimtek dan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan mutu dan profesionalisme aparatur pemeriksa.
6. Membuat rencana aksi dalam rangka pencapaian program yang memerlukan tahapan dalam pelaksanaan sehingga tiap kegiatannya dapat berjalan secara simultan dan berkelanjutan.
7. Memperhitungkan kebutuhan anggaran serta kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Memperbaharui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

1. **Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah**

   Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja yang dapat dilihat dengan capaian tujuan, 1 (satu) indikator sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran program sebagai berikut :

   1. **QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)**

      Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan nilai 3 dan tahun 2024 dengan nilai 3,004 telah menunjukkan trend kenaikan pertumbuhan kinerja tetapi belum ada peningkatan capaian nilai yang berarti dari tahun ke tahun. Komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern serta semangat meningkatkan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level QA SPIP.

   2. **QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)**

      Quality Assurance (QA) IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)

      dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 masih NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai tahun 2022 dengan capaian 2,973 tahun 2023 dengan capaian 2,800 dan tahun 2024 dengan capaian 2,802 dimana capaian ini masih di level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja level 3 dapat dicapai. Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,802 (level 2) disebabkan belum adanya identifikasi risiko *fraud* dan kemitraan dan atas efektivitas pengendalian dan pengelolaan

risiko belum dilakukan secara konsisten. Untuk mencapai perlu upaya pengendalian risiko korupsi dengan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup 3 prinsip pengelolaan risiko korupsi yakni cegah, deteksi dan respon serta mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.

3. **QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)**

   QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 masih NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai tahun 2022 dengan capaian 2,871, tahun 2023 dengan capaian 2,891 dan tahun 2024 dengan capaian 2,897 dimana capaian ini masih di level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja level 3 dapat dicapai. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota salatiga perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya secara terus menerus guna meningkatkan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi unit pemilik risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

4. **Kapabilitas APIP**

   Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan, yang ditunjang oleh dukungan pengawasan yang baik, sehingga menghasilkan pengawasan berkualitas dan mewujudkan perannya secara efektif capaian kinerja tahun 2020 s.d 2024 dengan nilai capaian 3 telah menunjukkan trend kinerja yang stabil walaupun masih banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka mempertahankan hasil capaian Kapabilitas APIP Level 3 dan persiapan capaian Level 4 (Managed) dengan

mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata Kelola dan manajemen risiko.

Capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut :

a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern

Pengawasan Internal pemerintah daerah yang tertuang dalam LHP bertujuan memberikan jaminan kualitas (*Quality Assurance* / QA) bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan internal di Kota Salatiga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Itprov). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah dokumen yang memuat informasi tentang temuan-temuan dan rekomendasi menurut kriteria / standar pengawasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengawas. Hasil perhitungan laporan Tindak Lanjut Internal tahun 2024 di Kota Salatiga adalah 90,85%. Hasil TLHP internal terdiri atas penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kota Salatiga (83,21%), BPKP Provinsi Jateng (89,36%) dan Inspektorat Provinsi Jawa tengah (100%). Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 80%, dengan persentase 116,47%. Capaian persentase penyelesaian TLHP Internal tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 adalah 91,05% (menurun 0,2%) karena adanya peningkatan rekomendasi atas temuan LHP yang belum terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.

b. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pemeriksaan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yang dalam hal ini dilakukan oleh BPK yang bertujuan

memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah akurat dan mematuhi peraturan. Hasil opini Pengawasan BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK dengan 4 (empat) opini yang dapat diberikan yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penyelesaian rekomendasi atas TLHP Pengawasan Eksternal dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan dan dapat diterapkan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh jajarannya di internal OPD dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil perhitungan laporan tindak lanjut BPK RI tahun 2024 adalah 94,41%. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 88% dengan persentase 107,28% Capaian persentase penyelesaian TLHP Eksternal (BPK) tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 adalah 95,87% (menurun 1,46%) karena di tahun 2024 telah terbit 2 LHP BPK yaitu Audit Kinerja Mandatory Spending dan Audit Laporan Keuangan Kota Salatiga yang belum terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.

c. **Nilai MCP Korsupgah KPK**

Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi dengan menggunakan *platform* dalam aplikasi Jaga.id yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan menilai upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 2024 dengan capaian 94,58% mengalami kenaikan dibandingkan hasil capaian pada periode tahun 2023 dengan hasil capaian 88,08% dengan hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada peringkat 71 cari 542

Instansi secara nasional dan berada dalam urutan ke 25 dari 36 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 84% dengan persentase 112,59%.

d. **Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP**

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. SAKIP merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan utama yang menjadi potret kinerja suatu instansi pemerintah. Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP adalah jumlah OPD yang meningkat nilai evaluasi SAKIP selama 2 tahun terakhir dibagi total OPD. Hasil perhitungan jumlah OPD meningkat nilai evaluasi SAKIP perbandingan tahun 2023 dan 2024 adalah 87%. Jumlah OPD yang naik nilai SAKIP nya adalah 27 OPD sedangkan OPD yang turun nilai SAKIP nya adalah 4 OPD dari total 31 OPD sebagai Obrik. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 45% dengan persentase 193,33%.

e. **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Hasil Capaian Nilai SKM Inspektorat Daerah Kota Salatiga semester 1 tahun 2024 adalah 81,96 dan semester 2 tahun 2024 adalah 81,20 dimana nilai rata-rata SKM Inspektorat Salatiga tahun 2024 sebesar 81,58 mengalami kenaikan 0,49 dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian 81,09. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 80 dengan persentase 101,975%

2. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**

   a. **Permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah berdasarkan Tugas Pokok Fungsi**

      1. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Risiko;
      2. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;
      3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan;
      4. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berulang;
      5. Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan sehingga berpotensi untuk tidak tertangani
      6. Belum optimalnya pengelolaan saluran pengaduan bagi *Whistleblower System* (WBS) dan pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (PWKKND);
      7. Kurang optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKP dan Inspektorat Provinsi);
      8. Kurang optimalnya hasil Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI);
      9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terlambat menjadi kurang bermanfaat bagi pengendalian internal organisasi;
      10. Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak bisa ditindaklanjuti berpotensi menyebabkan kerugian daerah
      11. Belum optimalnya Penyuluhan Anti Korupsi bagi Internal dan Eksternal sebagai upaya pencegahan korupsi di kota salatiga;
      12. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama APIP dengan stakeholder dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi

13. Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi;
14. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data administrasi pengawasan digital;
15. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik digital di inspektorat.

b. Permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah di luar tugas pokok fungsi

1. Kurang komitmen dan pemahaman dari organisasi Perangkat Daerah dan segenap jajarannya terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa menghambat perkembangan organisasi dan menimbulkan celah kejadian korupsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Daerah;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

Tabel 2.2
Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepal Daerah terhadap capaian program Nasional

No	Program Prioritas Wali Kota	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dampak Terhadap Program Nasional	Hubungan dengan NSPK	Hubungan dengan SPM	Hubungan dengan SDGS
1.	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Adanya harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana memberikan dukungan dan selaras dengan program Nasional yang	Upaya Pencegahan Korupsi harus meningkatkan Indeks Integritas Nasional (SPI) Pemerintah Daerah	Pengawasan APIP memperhatikan jenis dan mutu pelayanan pengawasan yang wajib diterapkan dalam menjalanka	Pengawasan APIP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut berkontribusi pada

				termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba		n tugas yang bertujuan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan tujuan SDGs lainnya melalui pengawasan dan pembinaan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang kemudian akan menghasilkan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan (*Strength*)

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai;
3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit dalam pelaksanaan pengawasan;
4. Penggunaan Teknologi dan sistem pengawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan;
5. Adanya anggaran pelatihan dan sertifikasi APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Sedangkan *kelemahan* (*Weaknesses*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Rendahnya inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan pengawasan;
2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP;
3. Keterbatasan jumlah SDM Pengawasan dan Kesekretariatan;
4. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai keahlian pengawasan dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata;
5. Kendala dalam Komunikasi baik internal maupun dengan Obyek Pemeriksaan (Obrik).

c. Peluang (*Opportunities*)

Sedangkan peluang (*Opportunities*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Kemajuan teknologi dan sistem pengawasan digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis sistem informasi;
2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain (APIP di Inspektorat Kab/Kota lain, Inspektorat Provinsi, dan BPKP, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance);*
3. Adanya upaya Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi untuk mengukur capaian kinerja pemerintah;
4. Peningkatan pelayanan APIP dan saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi publik upaya pencegahan korupsi;
5. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang semula hanya sebagai pendeteksi masalah (*Watchdog)* bergeser dengan fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu / (*Quality Assurance);*
6. Adanya edaran bersama nomor 11 tahun 2024 tentang penguatan APIP Daerah meliputi anggaran pengawasan,

SDM, Independensi dan objektivitas, peran dan layanan APIP.

d. Tantangan (Threats)

Sedangkan tantangan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah:

1. Adanya intervensi politik yang dapat mengurangi independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. Munculnya modus baru dalam praktek fraud / kecurangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Adanya penolakan dari pihak yang terancam sehingga melakukan upaya menghalangi / sabotase / perlawanan terhadap upaya penguatan pengawasan;
4. Risiko keamanan data dan informasi karena serangan siber yang menimbulkan peretasan dan kebocoran data;
5. Pimpinan yang kurang konsisten dalam penerapan kebijakan pencegahan korupsi yang menimbulkan perbedaan *Judgment* pengawasan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

Tabel 2.3
Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Inspektorat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Inspektorat Daerah			Isu Strategis Inspektorat Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.	Belum optimalnya penguatan pengawasan Intern pemerintah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang terintegrasi dengan didukung SDM APIP yang kompeten	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek *strategis, insight & foresight* (AAIPI 2024)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

1. **Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.**

   Total pagu Inspektorat Daerah dalam penetapan RKPD tahun 2025 adalah Rp. 10.621.441.436,- dan anggaran penetapan APBD Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025 adalah 9.653.163.596 mengalami penurunan Rp. 968.277.840. Penurunan pagu anggaran pada DPA Inspektorat Daerah di penetapan terjadi di rekening gaji dan tambahan penghasilan ASN yang semula dalam RKPD tahun 2025 sudah dianggarkan untuk mencukupi 12 bulan termasuk gaji & tunjangan 13 dan 14.

   Selanjutnya terjadi pemotongan kembali dalam RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp. 9.501.044.148,- mengalami penurunan pagu RKPD Rp. -1.120.397.287. Jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan mandatory spending pengawasan, pagu anggaran yang di terima oleh inspektorat pada anggaran RKPD Perubahan tahun 2025 ini masih dibawah 0,75 % untuk anggaran pengawasan APIP di luar gaji.

   Sesuai amanat dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 dan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 dengan klasifikasi untuk Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Persentase (%) Alokasi Anggaran Pengawasan APIP

No	Total Belanja Daerah Kabupaten / Kota	% Anggaran Pengawasan
1.	s.d Rp. 1.000.000,000.000,-	1%
2.	Diatas Rp. 1.000.000.000.000,- s.d Rp. 2.000.000.000.000,-	0,75%
3.	Diatas Rp. 2.000.000.000.000,-	0.50%
	Catatan : Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan	

Tabel 2.5
Persentase Anggaran Mandatory Spending APIP dibandingkan dengan total anggaran belanja Kota Salatiga

No	Program	Anggaran pada Tahun 2025						
		Total Belanja APBD Penetapan Kota Salatiga 2025	% APIP	Pagu 2025 penetapan	% APIP	Pagu 2025 pergeseran	Kendala	Solusi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.047.089.121.157	0,744	7.786.796.696	0,802	8.395.398.248	Adanya efisiensi anggaran Inspektorat tahun 2025 sebesar Rp. 866.684.44 menyebabkan adanya perubahan perencanaan kegiatan prioritas OPD	Melaksanakan penyesuaian kebutuhan prioritas kegiatan OPD yang tetap mengutamakan pengawasan SPI dan Pendampingan dan asistensi kegiatan di OPD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan		0,024	246.446.900	0,022	229.096.900		
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		0,155	1.619.920.000	0,084	876.549.000		
	TOTAL	**1.047.089.121.157**	**0,922**	**9.653.163.596**	**0,907**	**9.501.044.148**		

2. **Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.**

   Efisiensi pagu anggaran Inspektorat Daerah dilaksanakan menindaklanjuti edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 perihal penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dimana Inspektorat Daerah Kota Salatiga melaksanakan arahan dengan melaksanakan pengurangan anggaran sebesar Rp. - 866.684.448,- dan mengajukan penambahan untuk kebutuhan pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang masih belum terpenuhi 12 bulan, sehingga untuk pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN ada penambahan anggaran sejumlah Rp. 714.565.000,-

Tabel 2.6
Penjelasan Atas Rancangan Perubahan RKPD

OPD : Inspektorat Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	Efisiensi & penyesuaian kebutuhan	Tambahan Gaji	Pagu Akhir	Catatan Penelitian
A	Program Penunjang urusan pemda						
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daera						
1	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD	5.000.000			5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.01.2.02)					-	
2	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	5.780.472.380	-	714.565.000	6.495.037.380	
3	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.500.000	-		17.500.000	
	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (6.01.01.2.03)					-	
4	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan BMD SKPD (asuransi Mobnas)	22.500.000			22.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.01.01.2.05)					-	
5	6.01.01.2.05.0005	Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	377.000.000			377.000.000	
6	6.01.01.2.05.0009	Monev Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000			5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (6.01.01.2.06)					-	
7	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	-		8.000.000	
8	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	14.006.400	-		14.006.400	
9	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik Kantor	55.000.000	-		55.000.000	
10	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	-		25.000.000	
11	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.102.000	-		3.102.000	
12	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	-		15.000.000	
13	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas)	452.000.000	16.586.552		468.586.552	Penyesuain anggaran probity audit BPKP 4 orang 5 hari penginapan dan uang harian ditanggung inspektorat salatiga
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemda (6.01.01.2.08)					-	
14	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	-		2.500.000	
15	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	45.707.016			45.707.016	
16	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (sewa mesin FC)	18.000.000	-		18.000.000	
17	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor (upah THL dan BPJS THL)	172.000.000	20.000.000		192.000.000	penyesuaian gaji THL dengan SK baru+ tambah outsourcing kebersihan 1 orang (4 bulan)

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.01.01.2.06)					-	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.383.700	35.000.000		74.383.700	Pengadaan Peralatan pengawasan = 35.000.000
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemda (6.01.01.2.09)					-	
18	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (servis, suku cadang dan BBM)	38.000.000	-		38.000.000	
19	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.754.900	-		203.754.900	
20	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	-		6.000.000	
21	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (komputer dll)	40.000.000	-		40.000.000	
22	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	439.866.300	- 175.050.000		264.816.300	Pengurang : gedung tahap 2 = 242.550.000 -67.500.000,- (DED gedung)
23	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.004.000	-		2.004.000	
B	Program Penyelenggaran Pengawasan (6.01.02)					-	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (6.01.02.2.00)					-	
24	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	7.667.800	-		7.667.800	
25	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	12.739.000	-		12.739.000	
26	6.01.02.2.01.0003	Reviu laporan kinerja	9.222.900			9.222.900	
27	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan keuangan	14.611.000	-		14.611.000	
28	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama pengawasan internal	146.457.000			146.457.000	
29	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	14.802.800	-		14.802.800	
	Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (6.01.02.2.00)					-	
30	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah	22.350.000	- 17.350.000		5.000.000	Pengurangan honor tim & sekretariat TPKD
31	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18.596.000	-		18.596.000	
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (6.01.03)					-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan (6.01.03.2.01.00)					-	
32	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5.000.000	- 2.500.000		2.500.000	

	Pendampingan dan Asistensi (6.01.03.2.02.00)					-	
33	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	360.000.000	-220.404.000		139.596.000	Pengurang Workshop maturitas SPIP =101.090.000-7.500.000 (12.500*2+25.000),-= 93.590.000,- (konsumsi) dan larwasda = 172.264.000-(303.000*150)
34	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30.170.000	-		30.170.000	
35	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.180.000.000	-522.967.000		657.033.000	Pengurang : festival integritas = 350.000.000,- study tiru MCP = 80.820.000,- FAG = 99.647.000-7.500.000 (konsumsi) = 92.147.000
36	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	44.750.000	-		44.750.000	
		TOTAL	**9.653.163.196**	**866.684.448**		**9.501.043.748**	

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
   a. Anggaran dalam Rancangan Perubahan RKPD belum mengakomodir rencana penyesuaian kelas jabatan untuk Inspektur Pembantu (Irban) menindaklanjuti surat Menpan RB RI nomor : B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan di Instansi Daerah dimana kelas jabatan Inspektur Pembantu (irban) di Inspektorat Daerah yang semula kelas 11 menjadi kelas 12 yang berimplikasi pada kenaikan besaran tunjangan penghasilan yang saat ini nominal nya masih dibahas, untuk mengatasi kenaikan tersebut Inspektorat tidak mengajukan tambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN tetapi memaksimalkan pergeseran pagu internal pasca penetapan perubahan RKPD.

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Perubahan Renja
Inspektorat Daerah
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	V			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
     b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
     a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
   - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     a. Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai;
     b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
     b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
     c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
     d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
     e. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
     f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
     g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;
   - 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     a. Pengadaan Mebel;
     b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Pemeliharaan Mebel;
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
c. Reviu Laporan Kinerja;
d. Reviu Laporan Keuangan;
e. Kerjasama Pengawasan Internal;
f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah;
b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

3. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan

a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan;

3.1 Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
b. Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
d. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

1.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Salatiga memfokuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sesuai prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga dalam rencana kerja dan pendanaan anggaran. Dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan 2025 telah tampilkan dalam tabel 3.1 terlampir.

Total Pagu Anggaran penetapan Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah Rp. 9.653.163.596,- dengan total pagu APBD Kota Salatiga tahun 2025 adalah 1.047.089.121.157,- (prosentase 0,92%). Pada anggaran perubahan 2025 pagu Inspektorat menjadi Rp. 9.501.044.148,- mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 152.119.448,- menindaklanjuti arahan efisiensi anggaran berdasarkan edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 perihal penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dimana Inspektorat Daerah Kota Salatiga melaksanakan arahan dengan melaksanakan pengurangan anggaran Rp. - 866.684.448,- dan mengajukan penambahan kebutuhan pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang belum terpenuhi 12 bulan sejumlah Rp. 714.565.000,-.

Tabel 3.1
Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025

OPD : Inspektorat Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2025		Pagu Indikatif		
			Sebelum	Sesudah	Pagu APBD 2025	Pagu RKPD Perubahan 2025	Bertambah / berkurang
A	Program Penunjang urusan pemda				7.786.796.696	8.397.898.248	611.101.552
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daera		100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	
1	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.01.2.02)		100 %	100 %	5.797.972.380	6.512.537.380	714.565.000
2	6.01.01.2.02.0001	14 Dokumen	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	5.780.472.380	6.495.037.380	714.565.000
3	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000	17.500.000	-
	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (6.01.01.2.03)		100 %	100 %	22.500.000	22.500.000	-
4	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan BMD SKPD (asuransi Mobnas)	2 Dokumen	2 Dokumen	22.500.000	22.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.01.01.2.05)		100 %	100 %	382.000.000	382.000.000	-
5	6.01.01.2.05.0005	Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42 Orang	42 Orang	377.000.000	377.000.000	
6	6.01.01.2.05.0009	Monev Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (6.01.01.2.06)		100 %	100 %	382.000.000	382.000.000	-
7	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	6 Paket 6	6 Paket 6	8.000.000	8.000.000	-
8	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Paket	12 Paket	14.006.400	14.006.400	-
9	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik Kantor	26 Paket	26 Paket	55.000.000	55.000.000	-
10	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			25.000.000	25.000.000	-
11	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.102.000	3.102.000	-
12	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	-
13	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas)	120 Laporan	120 Laporan	452.000.000	468.586.552	16.586.552
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemda (6.01.01.2.08)		100 %	100 %	238.207.016	258.207.016	-
14	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	2.500.000	-
15	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	45.707.016	45.707.016	
16	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (sewa mesin FC)	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000	18.000.000	-
17	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor (upah THL dan BPJS THL)	12 Laporan	12 Laporan	172.000.000	192.000.000	20.000.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.01.01.2.06)		100 %	100 %	39.383.700	74.383.700	35.000.000
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	39.383.700	74.383.700	35.000.000
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemda (6.01.01.2.09)		100 %	100 %	729.625.200	554.575.200	- 175.050.000
18	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (servis, suku cadang dan BBM)	1 unit	1 unit	38.000.000	38.000.000	-
19	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	18 Unit	203.754.900	203.754.900	-
20	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2 Unit	2 Unit	6.000.000	6.000.000	-
21	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (komputer dll)	39 Unit	39 Unit	40.000.000	40.000.000	-
22	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	1 unit	439.866.300	264.816.300	- 175.050.000
23	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	2.004.000	2.004.000	-
B	Program Penyelenggaran Pengawasan (6.01.02)				246.446.500	229.096.500	-
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (6.01.02.2.00)		100 %	100 %	205.500.500	205.500.500	-
24	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	48 Laporan	48 Laporan	7.667.800	7.667.800	-
25	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	26 Laporan	26 Laporan	12.739.000	12.739.000	-
26	6.01.02.2.01.0003	Reviu laporan kinerja	4 Laporan	4 Laporan	9.222.900	9.222.900	
27	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	14.611.000	14.611.000	-
28	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama pengawasan internal	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	146.457.000	146.457.000	
29	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	14.802.800	14.802.800	-
	Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (6.01.02.2.00)		100 %	100 %	40.946.000	23.596.000	-17.350.000
30	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22.350.000	5.000.000	- 17.350.000
31	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	18.596.000	18.596.000	-
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (6.01.03)				1.619.920.000	873.549.000	-745.871.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan (6.01.03.2.01.00)		100 %	100 %	5.000.000	2.500.000	- 2.500.000
32	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5.000.000	2.500.000	- 2.500.000

	Pendampingan dan Asistensi (6.01.03.2.02.00)		100 %	100 %	1.614.920.000	871.549.000	-743.371.000
33	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	360.000.000	139.596.000	- 220.404.000
34	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	30.170.000	30.170.000	-
35	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 kegiatan	7 kegiatan	1.180.000.000	657.033.000	- 522.967.000
36	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	44.750.000	44.750.000	-
		TOTAL			**9.653.163.196**	**9.501.043.748**	**- 152.119.448**

1.3 Perubahan target kinerja IKU, IKD, maupun program tahun 2025

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Salatiga. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja program tahun Inspektorat Daerah 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Catatan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Indikator Kinerja Utama (IKU)						
1.	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	
2.	QA SPIP	Nilai	3	3,08	3,08	3,1	
3.	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,8	2,98	2,98	3	
4.	QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,897	2,94	2,94	3	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	82	81.3	84	Penurunan target target perubahan 2025 melihat realisasi capaian kinerja 2024
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
6.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	90	81	90	82	Kenaikan target perubahan 2025 melihat realisasi kenaikan kinerja 2024

7.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	94	89	94	90	Kenaikan target perubahan 2025 melihat realisasi kenaikan kinerja 2024
8.	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	52	60	60	75	Kenaikan target perubahan 2025 melihat realisasi kenaikan kinerja 2024
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
9.	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	94.58	85	94.58	86	Kenaikan target perubahan 2025 melihat realisasi kenaikan kinerja 2024

Perubahan target kinerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025 terjadi pada indikator kinerja program yang dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja dan analisis yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yaitu : capaian kinerja tahun sebelumnya, kenaikan / penurunan alokasi anggaran yang akan mempengaruhi capaian kinerja, perubahan kebijakan / regulasi yang mempengaruhi, adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan adanya perubahan target karena hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya serta adanya faktor eksternal yang positif sehingga menjadi pendorong capaian kinerja program.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan tahun 2025 dan Inspektorat Kota Salatiga untuk sumber dana APBD secara detail dapat dilihat dalam data terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan dilaksanakan dari tahun n-1 (2024), tahun n+1 (2026) agar pelaksanaannya dapat terus dan berkesinambungan.

Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah.

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN

WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
d. Bab IV : Penutup.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Tembusan:
1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Cemara No. 38 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325518
Fax. (0298) 325518 Situs https://irda.salatiga.go.id
Surat Elektronik irda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SALATIGA

NOMOR : 000. 7.2 /37 /2025

TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025

INSPEKTUR KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu dibentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadual yang ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:

a. menyiapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025; dan
b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab pada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :di Salatiga
pada tanggal : 15 September 2025

Plt. INSPEKTUR KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUTHOIN

Tembusan:
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 000.7.2/37/2025
TANGGAL : 15 September 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah	Anggota
9.	P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
10.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
11.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
12.	P2UPD Pertama pada Inspektorat Daerah	Anggota
13.	Staf pada Inspektorat Daerah	Anggota

Plt. INSPEKTUR KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUTHOIN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berfambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							**10.621.441.435,00**	**9.653.163.596,00**	**9.501.044.148,00**	**-1.120.397.287,00**							**11.723.829.504,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.621.441.435,00**	**9.653.163.596,00**	**9.501.044.148,00**	**-1.120.397.287,00**							**11.723.829.504,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.621.441.435,00**	**9.653.163.596,00**	**9.501.044.148,00**	**-1.120.397.287,00**							**11.723.829.504,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**82 %**	**82 %**	**8.767.824.535,00**	**7.786.796.596,00**	**8.385.398.248,00**	**993.001.779,00**							**9.879.826.314,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	3.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		5.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			5.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN*				100 %	100 %	6.316.250.218,00	5.797.972.380,00	6.512.537.380,00	196.287.161,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		6.947.875.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.298.750.218,00	5.780.472.380,00	6.495.037.380,00	196.287.161,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			6.928.825.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			19.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		24.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			24.750.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	380.000.000,00	382.000.000,00	382.000.000,00	2.000.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		420.200.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			5.500.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				42 Orang	42 Orang	377.000.000,00	377.000.000,00	377.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			414.700.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	572.108.400,00	572.108.400,00	588.694.952,00	16.586.552,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		647.564.267,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			8.800.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.006.400,00	14.006.400,00	14.006.400,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			15.407.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	55.909.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			60.500.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	25.009.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			27.500.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.102.000,00	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			3.412.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.909.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			16.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	452.000.000,00	452.000.000,00	468.586.552,00	16.586.552,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			515.445.267,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				0 %	0 %	80.000.000,00	39.383.700,00	74.383.700,00	-5.616.300,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		88.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	80.000.000,00	39.383.700,00	74.383.700,00	-5.616.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			88.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	226.207.016,00	238.207.016,00	258.207.016,00	32.000.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		284.027.717,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			2.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.707.016,00	45.707.016,00	45.707.016,00	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.277.717,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			19.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.000.008,00	172.000.000,00	192.000.000,00	27.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			211.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	1.167.755.808,00	729.626.200,00	554.575.200,00	-613.183.700,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		1.252.909.390,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.300.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			41.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	192.754.808,00	203.754.900,00	203.754.900,00	11.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			224.130.360,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			6.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	39 Unit	40.900.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			44.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	885.900.000,00	439.866.300,00	264.818.300,00	-624.183.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			934.175.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.904.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			2.204.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal**				**60 80 81 % % %**	**60 80 81 % % %**	**240.446.900,00**	**240.446.900,00**	**229.096.900,00**	**30.844.200,00**							**271.091.190,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 %	100 %	195.500.900,00	205.500.900,00	205.500.900,00	6.000.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		226.050.190,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				48 Laporan	48 Laporan	7.867.800,00	7.867.800,00	7.867.800,00	0,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			8.434.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				28 Laporan	28 Laporan	12.739.000,00	12.739.000,00	12.739.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			14.013.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	9.222.900,00	9.222.900,00	9.222.900,00	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			10.145.190,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	14.611.000,00	14.611.000,00	14.611.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			16.072.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0008	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	146.457.400,00	146.457.400,00	146.457.400,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			161.193.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	14.802.800,00	14.802.800,00	14.802.800,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			16.283.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				100 %	100 %	40.946.000,00	40.946.000,00	23.596.000,00	-17.350.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		45.041.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	22.350.000,00	22.350.000,00	5.000.000,00	-17.350.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			24.585.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	10 Laporan	18.596.000,00	18.596.000,00	18.596.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			20.456.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai MCP Korsupgah KPK**				**85 %**	**85 %**	**1.613.179.000,00**	**1.619.920.000,00**	**876.549.000,00**	**-736.742.000,00**							**1.791.912.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				100 %	100 %	3.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat daerah, OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		5.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	3.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			5.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Laporan pendampingan dan asistensi*				100 %	100 %	1.610.179.000,00	1.614.920.000,00	874.049.000,00	-736.121.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Inspektorat Daerah, OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		1.776.412.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Diskusikan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	360.000.000,00	360.000.000,00	142.233.000,00	-217.767.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			396.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Diskusikan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	30.170.000,00	30.170.000,00	30.170.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			33.187.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi				7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.180.900.000,00	1.180.000.000,00	648.483.000,00	-531.817.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			1.298.000.000,00	INSPEKTORAT
	5.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	40.000.000,00	44.750.000,00	53.163.000,00	13.163.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			49.225.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH								**10.821.441.435,00**	**9.853.162.596,00**	**9.901.044.148,00**	**118.305.090.851,00**							**11.723.829.504,00**	